

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmawan DA, 2017. *Identifikasi Masalah Dan Catatan Kritis: Pengalaman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidoarjo*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Yogyakarta.
- Erlies, Septiana N. dan Salim HS. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsono Boedi, 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Komaruddin, Y. T. 2002. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Marzuki, P. M. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ratmono, 2017. *Tantangan Pelaksanaan PTSL*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia.
- Saena HG, 2018. Skripsi: *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Soejono dan Abdurrahman, 1995. *Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak milik, Hak sewa Guna, dan Hak Guna Bangunan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Soeprapto, MFI 2010, *Ilmu perundang-undangan: jenis, fungsi, dan materi muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kementrian Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanaha Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Intruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lengkap

Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap No 01/JUKNIS-300/2016.

Petunjuk Teknis Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis No. 01/JUKNIS-400/XII/2016.

Petunjuk Teknis No. 1069/3.1-100/IV/2018 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah.

Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 261/KEP-7.1/XI/2014 Tentang Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Masyarakat Yang Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera.

3. Data-data elektronik

<http://www.kliknews.id/2017/02/bpn-luncurkan-program-pts1.html> diakses pada tanggal (25 Agustus 2018 pada pukul 19.33).

<http://kepri.atrbpn.go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/percepatan-pendaftaran-tanahsistematis-lengkap-66325.aspx>, di akses pada Tanggal 25 Oktober 2018

<Data.jatengprov.go.id> di akses tanggal 16 februari 2019

<https://pekalongankota.go.id/halaman/geografi.html> diakses pada 14 Februari 2019.

https://krjogja.com/web/news/read/59841/Prona_Zaman_Now di akses pada 25 Maret 2019.

https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts1-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr diakses pada 29 Desember 2018.

4. Wawancara

Ghufron, Wawancara, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL 2018 di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, Pekalongan 8 Februari 2019

Bodro, wawancara, Satgas Yuridis PTSL 2018 di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, Pekalongan 9 November 2018